



Diplomasi Lingkungan Indonesia melalui ASEAN dalam Menanggulangi *Marine Plastic Debris*

Hendar

Mahasiswa program studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Indonesia;

Email: hendarhasan24@gmail.com

Teuku Rezasyah

Dosen studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;

Email: Teuku.rezasyah@unpad.ac.id

Deasy Silvya Sari

Dosen studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Indonesia;

Email: deasy.silvya@unpad.ac.id

| submit: 14-07-2022 | Accept: 10-08-2022 | Publish: 13-08-2022 |

Keywords

environmental diplomacy, marine plastic debris, Indonesia, ASEAN

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe how Indonesia carries out environmental diplomacy to deal with plastic waste in the sea through ASEAN. The research method used is qualitative and data collection techniques with literature study. The researcher uses the theory of environmental diplomacy to be able to analyze the process of Indonesia's environmental diplomacy through ASEAN. The results show that marine plastic debris is a transboundary problem. Therefore, a joint commitment at the regional and global levels is needed. In this case, Indonesia is carrying out environmental diplomacy through ASEAN by encouraging the preparation of regional action plans to combat marine plastic debris. This is important because the four ASEAN countries (Indonesia, Vietnam, Thailand, the Philippines) are the largest producers of marine plastic debris in the world. Indonesia is involved in every stage of environmental diplomacy in ASEAN from the initiation stage to the implementation of the ASEAN Regional Action Plan to Combat Marine Debris in ASEAN Member States 2021 – 2025.

Kata Kunci

diplomasi lingkungan, sampah plastik di laut, Indonesia, ASEAN

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat menggambarkan bagaimana Indonesia melakukan diplomasi lingkungan untuk menangani sampah plastik di laut melalui organisasi regional ASEAN. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Peneliti menggunakan teori diplomasi lingkungan untuk dapat menganalisis proses diplomasi lingkungan Indonesia melalui ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampah plastik di laut merupakan masalah lintas batas yang membutuhkan komitmen bersama di tingkat regional dan global. Indonesia telah melakukan diplomasi lingkungan melalui ASEAN dengan mendorong penyusunan rencana aksi regional untuk memerangi sampah plastik di laut. Hal ini penting karena empat negara ASEAN (Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina) merupakan negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Indonesia terlibat dalam setiap tahap diplomasi lingkungan di ASEAN mulai dari tahap inisiasi hingga implementasi Rencana Aksi Regional ASEAN untuk menangani Sampah Laut di Negara Anggota ASEAN 2021 – 2025.

PENDAHULUAN

Marine Plastic Debris atau sampah plastik laut telah menjadi permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan laporan *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) pada November 2021, ada lebih dari 300 juta ton plastik diproduksi setiap tahunnya untuk berbagai kegunaan. Dari angka tersebut, terdapat sekitar 14 juta ton plastik berakhir di lautan setiap tahunnya. Jumlah dari sampah plastik mencapai 80 persen dari semua sampah yang ada di laut, baik dilaut permukaan maupun laut dalam (IUCN, 2021). Artinya, sebagian besar sampah di laut merupakan plastic. Hal ini juga menunjukkan bahwa *marine plastic debris* merupakan permasalahan lingkungan yang serius.

Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Indonesia menghasilkan sekitar 3,22 juta ton per tahun dengan sampah yang terbuang ke laut mencapai 0,48-1,29 metrik ton per tahun (World Bank, 2018, hal. 1). Indonesia juga berada di peringkat kelima di dunia sebagai negara dengan sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik. Sampah yang tidak dikelola dengan baik adalah material yang dibuang sembarangan atau tidak dengan benar dan sangat berisiko tinggi masuk ke laut. Terdapat sekitar 820 ribu sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik di Indonesia. Sampah plastik laut di Indonesia mencapai sekitar 6,8 persen dari keseluruhan sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik (Meijer, van Emmerik, van der Ent, Schmidt, & Lebreton, 2021, hal. 6).

Data di atas menunjukkan bahwa sampah plastik laut menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian besar pemerintah Indonesia. Namun secara lebih luas, sampah plastik tidak hanya menjadi masalah Indonesia, tetapi juga negara-negara Asia lainnya, karena arus laut yang mengakumulasi sampah di perairan Samudera Hindia dan Pasifik. Data dari World Bank (2018, hal. 2) tahun 2018 menyebutkan terdapat lima negara

penyumbang sampah plastik terbesar di laut yang semuanya merupakan negara di Kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, yaitu Tiongkok, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand.

Sebagai bentuk keseriusan penanganan masalah sampah plastik laut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden No.83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut sebagai dasar pelaksanaan program Rencana Aksi Nasional (RAN) penanganan sampah plastik di laut pada 2018-2025. Kebijakan ini merupakan wujud komitmen Indonesia dari hasil *World Ocean Summit 2017* yang diselenggarakan di Bali (Kemlu, 2019). Target dari program ini adalah dapat mengurangi 70 persen sampah plastik di laut pada tahun 2025 (Kemenko Marves, 2020).

Mengingat sifat lautan yang tanpa batas, Indonesia juga melakukan upaya lintas batas negara di tingkat regional dan global terkait sampah plastik di laut, yaitu dengan diplomasi lingkungan. Sampah plastik laut yang telah menjadi masalah transnasional memerlukan adanya komitmen politik yang kuat dari semua negara untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Diplomasi lingkungan untuk penanganan sampah plastik di laut oleh Indonesia dilakukan sejak tahun 2015, setelah pemerintah Joko Widodo menjadikan bidang kemaritiman menjadi salah satu fokus kebijakan luar negerinya. Terdapat tiga hal utama yang menjadi prioritas kebijakan maritim Indonesia, yaitu (1) perlindungan ekosistem dan sumber daya hayati laut; (2) pengembangan infrastruktur laut untuk memperkuat navigasi maritim di Indonesia, dan (3) penanganan kejahatan di laut dan penguatan domain keamanan di laut (Hermawan & Sidik, 2019). Salah satu isu penting yang menjadi perhatian utama dalam kebijakan maritim adalah perlindungan ekosistem laut, dimana masalah utamanya adalah penanganan sampah plastik di laut.

Dalam upaya diplomasi lingkungan, Indonesia sejak tahun 2015 telah melakukan kampanye tentang ancaman sampah plastik di tingkat global. Hal ini dibuktikan dengan posisi Indonesia sebagai *co-sponsor* resolusi *Marine*

Plastic Debris and Microplastic yang diusulkan Norwegia pada pertemuan United Nations Environment Assembly (UNEA). Selain itu, dalam pertemuan *Our Ocean Conference* pada 2018, Indonesia juga menyampaikan 22 komitmennya yang 5 di antaranya merupakan upaya untuk menanggulangi sampah plastik di laut (Kemlu, 2019).

Pada tingkatan regional, Indonesia menjadi penginisiasi penyusunan Rencana Aksi Kawasan dalam Penanganan Sampah Plastik di Lautan (*Regional Plan of Action on Combating Marine Plastic Debris*) melalui KTT East Asia Summit (EAS) di Bali pada September 2017. Kampanye Indonesia melalui EAS ini kemudian berhasil mendorong ASEAN untuk mulai menyusun Kerangka Aksi ASEAN untuk Sampah Laut (*The ASEAN Framework of Action on Marine Debris*) yang mulai dikembangkan setelah Konferensi ASEAN di Phuket pada November 2017. Pada Mei 2021, ASEAN secara resmi meluncurkan Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Memerangi Sampah Laut di Negara Anggota ASEAN 2021 – 2025 (ASEAN, 2021).

Dalam sejumlah penelitian terdahulu, Indonesia merupakan negara yang aktif melakukan diplomasi lingkungan. Robertua dan Sigalingging (2019) menemukan bahwa Indonesia merupakan aktor sentral dalam mitigasi permasalahan lingkungan di tingkatan regional maupun global. Hal ini membuat diplomasi lingkungan tidak terhindarkan bagi Indonesia. Presiden Joko Widodo bahkan melakukan reformasi diplomasi lingkungan Indonesia dengan mendirikan Badan Restorasi Gambut (BRG) dan bergabung dengan Global Peatland Initiatives (GPI) untuk menangani masalah kebakaran hutan dan pencemaran udara lintas batas. Dalam penelitian Ningsih (2019) juga menemukan Indonesia melakukan diplomasi lingkungan dengan Norwegia melalui perjanjian REDD (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation*) untuk menjaga kelestarian hutan di Indonesia dengan mengurangi deforestasi dan degradasi

hutan. Melalui diplomasi lingkungan ini, Indonesia mendapatkan bantuan dana dari Norwegia untuk penanganan masalah deforestasi hutan di Indonesia. Penelitian Firmalasari dan Rasyidah (2020) menunjukkan adanya upaya diplomasi lingkungan oleh Indonesia dalam penanganan peningkatan limbah medis pada masa pandemi Covid-19. Indonesia melakukan kerjasama dengan dengan Jepang, ASEAN dan WHO untuk mengatasi masalah penumpukan limbah medis akibat pandemi. Sementara itu, Kurniaty (2020) dalam penelitiannya menemukan Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi lingkungan dalam menghadapi penolakan produk minyak sawit (CPO) oleh Uni Eropa. Dalam diplomasi lingkungan ini Indonesia menggunakan pendekatan bilateral, multilateral, bahkan global untuk meyakinkan minyak sawit mereka tidak merusak lingkungan dan sejalan dengan tujuan global, yaitu pembangunan berkelanjutan.

Penelitian lainnya dari Hermawan dan Sidik (2019) serta Zen dkk (2019) juga menunjukkan bahwa Indonesia melakukan diplomasi untuk penanganan sampah plastik laut. Namun berbeda dengan penelitian penulis, penelitian mereka menggunakan pendekatan diplomasi maritime. Hermawan dan Sidik (2019) menemukan bahwa RAN penanganan sampah plastik laut sebagai momentum diplomatik dari diplomasi maritim Indonesia. Mereka menilai bahwa Indonesia berhasil mengambil posisi kepemimpinan di tingkat regional untuk menangani permasalahan sampah plastik laut melalui East Asia Summit, Our Ocean Conference, dan Indonesia-Oceans Multi-Donor Trust Fund. Sementara Zen dkk (2019) menyimpulkan bahwa kerjasama kelautan Indonesia dengan Jepang merupakan bagian diplomasi maritim Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan sampah agar dapat mengurangi sampah laut. Hasil penelitian mereka merekomendasikan Indonesia dan Jepang harus berkolaborasi untuk memperkuat sumber daya dan kemampuan pusat untuk memperkuat pembangunan maritim. Indonesia

harus belajar dari pengalaman maritim Jepang, termasuk pengumpulan data sampah laut dan pengelolaan limbah.

Berbeda dengan penelitian terdahulu di atas, penelitian ini mengkaji tentang upaya diplomasi lingkungan Indonesia terkait *marine plastic debris* melalui ASEAN. Penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana Indonesia melakukan diplomasi lingkungan melalui ASEAN hingga terbentuknya Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Memerangi Sampah Laut di Negara Anggota ASEAN.

KERANGKA KONSEPTUAL

Diplomasi Lingkungan

Konsep yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah konsep diplomasi lingkungan. Konsep ini digunakan untuk dapat menjelaskan upaya Indonesia melalui diplomasinya melalui ASEAN dalam penanganan *marine plastic debris*.

Istilah diplomasi lingkungan sendiri dikenal setelah pembentukan pembentukan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) pada tahun 1973. Namun upaya diplomatik lingkungan telah ada sejak Konvensi Internasional untuk Peraturan Perburuan Ikan Paus yang awalnya ditandatangani oleh 15 negara pada tahun 1946 dan mulai berlaku pada tahun 1948. Istilah diplomasi lingkungan semakin umum digunakan setelah tahun 1992, yaitu setelah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED), yang lebih dikenal sebagai KTT Bumi atau KTT Rio, Brasil (Ali & Vladich, 2016, hal. 601).

Diplomasi lingkungan oleh sejumlah ahli didefinisikan secara beragam. Crnčec mendefinisikan diplomasi lingkungan sebagai sarana kebijakan luar negeri bagi suatu negara untuk mengejar kepentingan nasional (Udovič & Pongrac, 2016, hal. 33). Sementara Susskind (2015) mendefinisikannya sebagai kegiatan multilateral selain negara yang aktor utamanya adalah organisasi PBB, NGO, dan individu yang berkepentingan mencoba menemukan respons terkoordinasi terhadap masalah

lingkungan hidup. Susskind juga melihat bahwa diplomasi lingkungan mencakup perjanjian multilateral yang menjadi cara terbaik untuk menegosiasikan masalah lingkungan dalam konteks keamanan internasional yang lebih luas. Sementara Ali dan Vladich (2016, hal. 602) dalam karyanya berpendapat bahwa diplomasi lingkungan merupakan diskursus resolusi konflik lingkungan yang lebih luas dengan mempertimbangkan cara menyelesaikan konflik lingkungan dengan upaya prioritas konservasi.

UNEP (2014) mendefinisikan diplomasi lingkungan sebagai kombinasi alat dan pendekatan, yang melalui penanganan bersama lingkungan dan sumber daya alam membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menciptakan peluang kerjasama, pembangunan kepercayaan, dan transformasi konflik. Sementara Udovic dan Pongrac (2016, hal. 33) meminjam pandangan dari Benedick dan Weinber yang melihat bahwa diplomasi lingkungan muncul sebagai komponen integral dari hubungan internasional di era pasca-Perang Dingin dan mencakup negosiasi yang berlangsung saat mempersiapkan konferensi (kebanyakan di bawah PBB), dan finalisasi deklarasi, protokol dan perjanjian yang disepakati pada akhir acara internasional.

Diplomasi lingkungan menurut Chasek (2001) memiliki enam tahapan diplomasi, yaitu (1) Tahap pencetus, dimana lingkungan masalah diidentifikasi oleh komunitas internasional; (2) Tahap definisi masalah, dimana delegasi pemerintah dan / atau ilmuwan bekerja sama untuk menentukan sifat masalah dan mempersiapkan negosiasi; (3) Pernyataan posisi awal, dimana posisi khusus negara bagian pada masalah tersebut disajikan; (4) Tahap penyusunan atau pembentukan formula, tempat para delegasi memulai menggambar konsensus atau solusi untuk masalah yang dihadapi; (5) Perundingan akhir atau tahap detail, dimana pemerintah paling setuju atau tidak setuju rincian perdebatan yang diperdebatkan; (6) Tahap ratifikasi atau

implementasi, dimana perjanjian (biasanya) diadopsi dan dilaksanakan oleh para pihak.

METODE RISET

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif. Metode kualitatif dapat melihat suatu fenomena sosial secara mendalam, mengamati prosesnya, dan menarik kesimpulan. Penelitian kualitatif lebih fokus pada proses daripada hasil atau produk. Metode kualitatif dalam hal ini untuk menjelaskan diplomasi lingkungan Indonesia dalam penanggulangan sampah plastik di laut melalui ASEAN. Hal tersebut secara deskripsi akan dijelaskan dalam bentuk kata-kata secara konteks khusus yang alamiah. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dari berbagai sumber yang relevan yaitu buku, jurnal, dokumen perjanjian, laporan tahunan, laporan penelitian, dan artikel daring. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi Lingkungan Indonesia untuk Menanggulangi Marine Plastic Debris

Pelestarian lingkungan laut sejatinya telah menjadi komitmen internasional yang harus dijaga bersama berdasarkan sejumlah konvensi, yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), Konvensi London (1972), Konvensi MARPOL dan Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya. UNCLOS adalah perjanjian internasional yang mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara-negara mengenai penggunaan lautan dunia, menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam laut. Sementara tujuan Konvensi London adalah untuk mengendalikan semua sumber pencemaran laut dan mencegah pencemaran limbah laut. Begitu juga Konvensi MARPOL yang mengatur dan mencegah pembuangan sampah dari kapal. Konvensi Basel tentang Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya dirancang untuk mengurangi pergerakan lintas batas

limbah berbahaya dan mencegah transfer limbah berbahaya dari negara maju ke negara kurang berkembang (ASEAN, 2021, hal. 4).

Berdasarkan sejumlah konvensi tersebut, Indonesia sadar bahwa penanganan sampah plastik laut tidak cukup dilakukan secara domestik, tetapi juga tingkat internasional. Luhut B. Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dalam pertemuan EAS pada tahun 2018 menyatakan bahwa sampah plastik laut merupakan isu lintas batas dan Indonesia membutuhkan dukungan dan juga sinergi dengan negara-negara lain untuk penanggulangan sampah laut (Kemenko Marves, 2018). RAN penanganan sampah plastik laut juga disebutkan bahwa permasalahan ini membutuhkan komitmen bersama dunia internasional melalui kerjasama bilateral maupun multilateral untuk mengurangi sampah plastik di laut. Karena itu, diplomasi lingkungan merupakan instrumen yang penting bagi Indonesia untuk penanganan sampah plastik laut.

Indonesia bahkan telah aktif melakukan diplomasi lingkungan untuk mengkampanyekan ancaman sampah plastik laut kepada dunia internasional sejak tahun 2014 sebelum diterbitkannya RAN penanganan sampah plastik laut. Pada tahun tersebut, Indonesia ditunjuk menjadi co-sponsor resolusi *Marine Plastic Debris and Microplastic* dalam pertemuan UNEA (Kemlu, 2019).

Dalam pertemuan UNEA 1 pada Juni 2014, Indonesia bersama dengan negara-negara PBB lainnya mengeluarkan resolusi yang mencatat masalah pertumbuhan plastik dan mikroplastik di lingkungan laut, di mana polusi yang ditimbulkan berdampak negatif terhadap ekosistem, sumber daya alam, perikanan, pariwisata, ekonomi, serta menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Resolusi tersebut mengakui bahwa masalah ini berkembang karena plastik sangat banyak digunakan dan tidak dikelola atau dibuang dengan benar. Resolusi tersebut menekankan pentingnya pendekatan kehati-hatian, dan menunjukkan

perlunya lebih banyak pengetahuan dan penelitian tentang sumber dan dampak plastik. Resolusi ini juga mendesak tindakan untuk meningkatkan praktik pengelolaan limbah dan membersihkan puing-puing laut dan sampah yang sudah ada di lautan, serta mempromosikan penggunaan yang efisien dan pengelolaan plastik dan mikroplastik yang baik (UNEA, 2014).

Selain melalui UNEA, Indonesia juga turut terlibat dalam konferensi internasional terkait isu lingkungan dan kelautan lainnya. Pada tahun Februari 2017, Indonesia menjadi tuan rumah World Ocean Summit di Bali. Dalam pertemuan tersebut Indonesia sebagai negara maritim menyatakan komitmennya dalam menangani masalah sampah plastik laut. Indonesia berkomitmen untuk menekan jumlah sampah plastik laut hingga 70 persen pada tahun 2025. Indonesia juga mengajak negara-negara peserta untuk selalu memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam pembangunan yang berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan konservasi lingkungan (Greeners.co, 2017).

Pada tahun 2018, Indonesia juga kembali menjadi tuan rumah Our Ocean Conference pada 29-30 Oktober di Bali. Indonesia dipercaya untuk menjadi negara pertama di Kawasan Asia yang menyelenggarakan Our Ocean Conference kelima (Our Ocean, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah dipandang oleh dunia karena keaktifannya dalam memperjuangkan isu kedaulatan dan hak laut melalui diplomasi.

Dalam konferensi ini Indonesia kembali menyatakan komitmennya kepada dunia internasional dalam pelestarian lingkungan laut, termasuk penanganan masalah sampah plastik. Terdapat 22 komitmen yang disampaikan oleh Indonesia dalam pertemuan tersebut dan 5 diantaranya adalah komitmen untuk penanggulangan sampah plastik laut (Kemlu, 2019). Selain itu, melalui konferensi ini Indonesia juga membuka peluang kerja sama bilateral dengan beberapa negara peserta terkait kelautan. Misalnya kerjasama

penanganan sampah plastik dan perdagangan produk perikanan dengan Uni Eropa dan kerja sama pemberantasan *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* dengan Jepang, Amerika Serikat, Norwegia, dan Polandia (Manalu, 2018).

Fokus dari konferensi kelautan ini adalah untuk menghasilkan komitmen dan mengambil tindakan untuk menjaga keberlanjutan laut. Ada enam bidang aksi yang diusung dalam Our Ocean Conference 2018, di antaranya adalah perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*); kawasan konservasi laut (*marine protected area*); pencemaran laut (*marine pollution*); perubahan iklim (*climate change*); ekonomi biru berkelanjutan (*sustainable blue economy*); dan keamanan maritim (*maritime security*). Penanggulangan sampah plastik termasuk dalam bidang aksi *marine pollution*. Berbeda dengan konferensi biasanya yang menghasilkan penandatanganan MoU atau agreement, Our Ocean Conference 2018 menghasilkan komitmen yang konkret dengan enam bidang aksinya tersebut (KKP, 2018).

Pada tahun 2019, Indonesia bergabung dengan Global Plastic Action Partnership (GPAP) yaitu kolaborasi public-swasta internasional. Bergabungnya Indonesia dengan GPAP diresmikan oleh Menteri Menko Marves Luhut B. Pandjaitan pada Maret 2019 dengan meluncurkan Indonesia National Plastic Action Partnership (NPAP). Pemerintah Indonesia dan GPAP menerapkan strategi seperti mengumpulkan data pengelolaan sampah lokal dan membangun model yang mengevaluasi solusi seperti mengurangi kemasan berlebih, membuat plastik baru yang dapat didaur ulang, serta meningkatkan tingkat daur ulang dan pengumpulan sampah. Hal yang terpenting adalah model tersebut akan menghitung investasi yang dibutuhkan, timeline, jejak lingkungan dan emisi gas rumah kaca, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat (Supam et al., 2019).

Selain itu, Indonesia juga menjalin kerja sama bilateral dengan Norwegia dan Jepang untuk penanganan sampah plastik laut. Norwegia memiliki peran penting dalam upaya

global untuk mempromosikan laut yang bersih dan sehat. Norwegia telah berkomitmen 35 juta USD untuk memerangi plastik laut dan plastik mikro pada tahun 2018. Sebagian dari dana tersebut ditujukan untuk mendukung target berani pemerintah Indonesia untuk mengurangi sampah plastik ke laut hingga 70 persen pada tahun 2025 (Norway in Indonesia, 2018).

Sedangkan kerja sama Indonesia dengan Jepang dalam bidang lingkungan mulai dikembangkan pada tahun 2017. Kerja sama ini utamanya bertujuan untuk penanganan pencemaran lingkungan dan penanganan sampah laut. Kerja sama ini dilakukan dengan peningkatan manajemen pengolahan sampah di darat untuk menghindari kebocoran ke laut. Indonesia dan Jepang juga mengembangkan pengolahan sampah menjadi energi (*Waste to Energy*) dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) yang digagas sejak tahun 2018 (VOI.id, 2021).

Diplomasi Lingkungan Indonesia melalui ASEAN

Upaya diplomasi lingkungan Indonesia untuk menanggulangi sampah plastik laut juga dilakukan Indonesia di tingkatan regional, yaitu melalui ASEAN. Indonesia memandang bahwa komitmen negara-negara Asia Tenggara sangat diperlukan dalam penanganan masalah sampah plastik laut. Hal ini dikarenakan empat dari lima negara penghasil 50 persen keseluruhan sampah plastik laut adalah negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Data dari World Bank (2018, hal. 2) menyatakan bahwa jika 75 persen kebocoran sampah dari daratan pada negara-negara tersebut dapat ditekan, hal ini dapat mengurangi aliran sampah ke lautan secara global sebesar 45 persen.

Data lainnya dari ASEAN (2021, hal. 2–3) juga menunjukkan bahwa volume limbah padat dan sampah laut yang dihasilkan di seluruh Asia Tenggara telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut perkiraan, enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan

Singapura) saja menghasilkan total 243 juta ton sampah pada tahun 2016. Saat ini, diperkirakan 53 persen sampah yang dihasilkan di ASEAN tidak dikumpulkan. Dari sampah yang dikumpulkan, kurang dari seperempatnya didaur ulang. Jumlah yang tersisa dibuang secara ilegal setelah pengumpulan (sekitar 34 persen dari sampah yang dikumpulkan) atau diolah dan dibuang (sekitar 43 persen dari sampah yang dikumpulkan). Mempertimbangkan populasi di enam negara ini (pada tahun 2016) dan pangsa plastik di setiap sampah kota, diperkirakan dihasilkan 31,7 juta ton sampah plastik (16,8 juta ton di antaranya tidak terkumpul). Data ini semakin mempertegas bahwa sampah plastik laut tidak hanya masalah bagi Indonesia, tetapi juga masalah di tingkat regional dan global.

Diplomasi lingkungan Indonesia melalui ASEAN ini selanjutnya dideskripsikan dalam enam tahap, yaitu tahap pencetusan, definisi masalah, pernyataan posisi awal, penyusunan dan pembentukan formula, perundingan akhir dan tahap detail, serta implementasi.

1. Tahap Pencetusan

Untuk membangun komitmen dan aksi penanggulangan sampah plastik laut di Asia Tenggara, Indonesia menyelenggarakan East Asia Summit (EAS) untuk Memerangi Sampah Plastik di Laut pada 6-7 September 2017. Konferensi ini diselenggarakan oleh Indonesia dan Selandia Baru, dihadiri oleh lebih dari 85 peserta perwakilan dari negara peserta EAS (sepuluh negara anggota ASEAN, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Republik India, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat), baik dari *track I* (pemerintah) maupun *track II* (swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan ASEAN Sekretariat, dan lainnya) (Infopublik, 2017).

EAS sendiri merupakan KTT Asia Timur yang dicetuskan oleh ASEAN sejak tahun 2005. EAS pada awalnya terdiri dari 16 negara yaitu Negara Anggota ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Selandia

Baru, dan Republik Korea. Amerika Serikat dan Federasi Rusia bergabung pada KTT Asia Timur ke-6 di Bali, Indonesia pada 19 November 2011. EAS memiliki sembilan bidang prioritas kerja sama, yaitu lingkungan dan energi, pendidikan, keuangan, masalah kesehatan global dan penyakit pandemi, manajemen bencana alam, konektivitas ASEAN, keamanan pangan, perdagangan dan ekonomi, serata keamanan dan kerja sama maritim. Pertemuan EAS untuk penanganan sampah plastik laut ini termasuk dalam upaya Indonesia meningkatkan kerja sama EAS dalam bidang lingkungan dan maritim.

Pertemuan EAS ini juga merupakan tahap inisiasi dalam diplomasi lingkungan oleh Indonesia dalam penanganan sampah plastik laut. Indonesia dalam EAS 2017 menginisiasi penyusunan *Regional Plan of Action on Combating Marine Plastic Debris* (Rencana Aksi Kawasan dalam Penanganan Sampah Plastik di Lautan). Indonesia dalam pertemuan ini juga menyarankan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk memerangi sampah plastik di laut. Indonesia juga memberikan salah satu contoh pendekatan yang telah dilakukan, yaitu dengan dikeluarkannya Perpres No.16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Sampah Plastik di Laut untuk 2018-2025. Saran lainnya yang diberikan Indonesia adalah pemberlakuan kebijakan untuk mengubah sampah menjadi sumber energi, pengembangan bioplastik dari singkong dan rumput laut, serta pengembangan bank sampah (Tempo.co, 2018).

Dalam forum EAS ini beberapa negara seperti Jepang, Rusia, Australia dan Selandia Baru menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen dan langkah konkret pemerintah Indonesia. Mereka juga terkesan terhadap bagaimana Indonesia yang menekankan pentingnya perilaku dan menumbuhkan pemahaman akan bahaya pencemaran sampah plastik pada usia dini dengan upaya kampanye dan kurikulum di

sekolah sehingga mereka tertarik untuk bekerjasama dalam penanggulangan sampah di laut. Faktor lain juga sangat mempengaruhi seperti posisi geografis Indonesia yang strategis dan kondisi sosial ekonomi menjadikan Indonesia menempati posisi penting dalam lingkungan global sehingga dapat mempengaruhi ekonomi, kestabilan politik dan keamanan lingkungan regional serta internasional (Kemenko Marves, 2018).

2. Tahap Definisi Masalah

Inisiasi yang dilakukan Indonesia tersebut kemudian didukung oleh negara anggota ASEAN dan enam negara EAS lainnya. Pada KTT EAS ke 13 di Singapura pada tahun 2018, para kepala negara ASEAN, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Republik India, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Federasi Rusia, dan Amerika Serikat menyatakan komitmennya untuk meningkatkan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan laut dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang menyediakan kerangka hukum untuk konservasi dan pemanfaatan laut secara berkelanjutan dan sumber dayanya (ASEAN, 2018).

Upaya inisiasi oleh Indonesia juga berhasil meningkatkan komitmen ASEAN terhadap penanggulangan sampah plastik laut dengan diselenggarakannya ASEAN *Conference on Reducing Marine Plastic Debris* (Konferensi ASEAN tentang Pengurangan Sampah Plastik Laut) pada 22-23 November 2017 di Phuket, Thailand (ASEAN, 2017). Konferensi ini menjadi langkah lanjutan ASEAN dalam menyusun rencana aksi regional untuk menanggulangi sampah plastik laut setelah diinisiasi oleh Indonesia dalam pertemuan EAS September 2017.

Konferensi ASEAN di Phuket ini diselenggarakan oleh Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Thailand

yang berkoordinasi dengan Sekretariat ASEAN dan IUCN. Meskipun Indonesia tidak menjadi penyelenggara dalam pertemuan ini, Indonesia tetap melakukan diplomasi lingkungannya. Indonesia dalam pertemuan ini menyampaikan langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam penanggulangan sampah laut yang diharapkan dapat menjadi inovasi bagi ASEAN. Indonesia menunjukkan upaya mereka melalui RAN yang menargetkan penurunan jumlah sampah plastik hingga 70 persen. Upaya lainnya adalah melalui inovasi pengolahan sampah di Depok, yaitu dengan melatih warganya dalam pemilahan sampah sehingga berhasil mengalihkan 76 ton sampah dari tempat pembuangan sampah, mengurangi biaya kota dan merelokasi berton-ton sampah makanan ke fasilitas kompos, yang menjadikannya sebagai tanah subur untuk berkebun (ASEAN, 2017).

Konferensi ini merupakan tahap definisi masalah dalam diplomasi lingkungan untuk penanganan sampah laut di ASEAN. Konferensi ini mempertemukan lebih dari 200 peserta yang terdiri dari perwakilan dari Negara Anggota ASEAN, mitra dialog dan pembangunan, organisasi internasional, sektor swasta, peneliti dan akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas lokal, untuk pertukaran informasi, berbagi pengetahuan, dan diskusi konstruktif tentang tantangan dan peluang dalam mengatasi masalah pencemaran sampah laut di kawasan ASEAN melalui sesi Pleno dan Tematik. Konferensi meninjau status pencemaran sampah laut di kawasan ASEAN dari perspektif global, regional dan hukum; bertukar informasi tentang kebijakan, inisiatif, dan praktik terbaik nasional yang ada; mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan; dan membahas dua pendekatan utama menuju solusi, yaitu (1) solusi kebijakan dan manajemen dan (2) solusi kebijakan dan teknologi yang inovatif. Para peserta sepakat untuk merekomendasikan

langkah-langkah untuk mengatasi sampah laut melalui dukungan kebijakan dan penguatan kebijakan; peningkatan kapasitas; pendidikan, penelitian dan inovasi; keterlibatan sektor swasta; dan kesadaran dan sosialisasi publik (ASEAN, 2017).

3. Tahap Pernyataan Awal

Diplomasi lingkungan di ASEAN kemudian ditingkatkan menjadi tahap pernyataan awal dalam pertemuan ASEAN+3 (negara anggota ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Republik Korea) pada tahun 2018 menyepakati kerja sama untuk mengatasi masalah sampah plastik di laut, yang mempengaruhi perikanan, pariwisata, dan mungkin kesehatan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (1) meningkatkan pengelolaan sampah plastik dengan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dan “3R” (*Reduce, Reuse, Recycle*); (2) mempromosikan kesadaran, penelitian, dan pendidikan tentang sampah plastik laut; dan (3) memperkuat kerjasama regional dan internasional. Pertemuan ini juga menghasilkan inisiatif pengetahuan regional tentang marine plastic debris yang dikelola oleh Indonesia, yaitu Pusat Pengetahuan Regional untuk Sampah Plastik Laut (RKC-MPD) dimaksudkan sebagai pusat data yang dikelola oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) dan Pusat Kapasitas Regional untuk Laut Bersih (RC3S) (ASEAN, 2021).

Indonesia dalam tahap ini memainkan peran pentingnya dalam diplomasi lingkungan karena mengelola pusat data dan kapasitas regional tentang sampah plastik laut. Indonesia dalam hal ini turut berperan dalam berbagai kegiatan RKC-MPD, baik untuk sebagai pusat data maupun sebagai fasilitator jejaring antar pemangku kepentingan, meningkatkan kesadaran, mempromosikan tindakan inovatif di setiap kabupaten, dan memfasilitasi kerjasama nasional dan regional untuk memecahkan

masalah sampah plastik laut. Lebih jelasnya, kegiatan utama RKC-MPD adalah termasuk pengembangan fondasi pusat pengetahuan regional dengan mengidentifikasi kementerian dan lembaga yang bertugas di negara-negara ASEAN; mengumpulkan dan menganalisis informasi melalui tinjauan dan berbagi praktik dan kebijakan yang baik, aliran material dan metodologi pemantauan, serta praktik terbaik dan solusi inovatif; berbagi pengetahuan dengan mengembangkan situs web; dan meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas (RKCMPD-ERIA, n.d.).

Indonesia juga turut berperan dalam pendirian RC3S yang berkantor di Bali. Sejak diinisiasikan dalam pertemuan ASEAN+3, Indonesia bersama dengan COBSEA (The Coordinating Body on the Seas of East Asia) melanjutkan diskusi pendirian RC3S di Jakarta pada 8-9 April 2019. Selanjutnya Indonesia secara resmi mendirikan RC3S pada 2019 (KLHK, 2019). Tujuan dari RC3S adalah untuk berkontribusi pada pengurangan dan mitigasi sumber pencemaran laut berbasis daratan, dengan fokus khusus pada nutrisi, air limbah, sampah laut, dan mikroplastik. Berdasarkan tujuan ini, aktivitas utama dari RC3S adalah manajemen pengetahuan laut bersih, peningkatan kapasitas dan kesadaran laut bersih, model solusi laut bersih (RC3S, 2020).

4. Tahap Penyusunan Formula

Pada tahun 2019, diplomasi lingkungan untuk penanganan sampah laut masuk dalam tahap penyusunan formula, yaitu ketika negara-negara ASEAN menyepakati solusi untuk masalah sampah plastik laut. Hal ini terlihat dalam sejumlah pertemuan ASEAN pada Januari, Maret, dan Juni 2019. Pada Januari 2019, Rapat Koordinasi Aksi Sampah Laut di Kawasan ASEAN diselenggarakan sebelum pertemuan ke-20 ASEAN Working on Coastal and Marine Environment. Rapat koordinasi tersebut menyusun kembali lima pilar aksi menjadi empat kerangka kerja: dukungan kebijakan

dan perencanaan; penelitian, inovasi, dan pengembangan kapasitas; kesadaran publik, pendidikan, dan penjangkauan; dan keterlibatan sektor swasta. Rapat koordinasi juga mengidentifikasi berbagai tindakan dan kegiatan yang disarankan di bawah kerangka kerja ini (RKCMPD-ERIA, 2021).

Pada 5 Maret 2019, Pertemuan Tingkat Menteri Khusus ASEAN tentang Sampah Laut, yang diadakan di Bangkok, Thailand. Dalam pertemuan ini semua negara anggota menyambut baik Kerangka Aksi ASEAN tentang Sampah Laut, dan setuju untuk meneruskan Deklarasi Bangkok tentang Pemberantasan Sampah Laut di Kawasan ASEAN untuk dipertimbangkan dan diadopsi oleh Para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok, Thailand. Pada 22 Juni 2019, Deklarasi Bangkok diadopsi pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok. Dalam pertemuan ini, sepuluh negara anggota ASEAN juga menyepakati Kerangka Aksi ASEAN untuk Sampah Laut. Kerangka aksi ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Aksi Regional yang lebih rinci. Berdasarkan komitmen tersebut, Bank Dunia pada tahun 2020 mendukung ASEAN dalam penyusunan Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Memerangi Sampah Laut (RKCMPD-ERIA, 2021).

5. Tahap Perundingan Akhir

Diplomasi lingkungan untuk penanganan sampah plastik laut berlanjut pada tahap perundingan akhir atau tahap detail melalui tiga workshop pada 2019-2020. Workshop tersebut dilakukan dengan mitra pembangunan, pakar sektor swasta, akademisi terkemuka dan pejabat pemerintah terkait dari negara anggota ASEAN untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan tindakan potensial untuk Rencana Aksi Regional. Workshop ini mengidentifikasi bidang-bidang prioritas dari Kerangka Aksi yang menurut perwakilan negara anggota ASEAN sangat penting untuk menjadi bagian dari Rencana Aksi Regional.

Workshop pertama diselenggarakan di Bangkok, Thailand pada 29-30 Oktober 2019. Workshop ini mengidentifikasi bidang-bidang prioritas dari Kerangka Aksi yang menurut perwakilan negara anggota ASEAN sangat penting untuk menjadi bagian dari Rencana Aksi Regional. Fokus diskusi dalam pertemuan ini adalah Dukungan dan Perencanaan Kebijakan, yang memperluas analisis dan meningkatkan aksi nyata Deklarasi Bangkok tentang Kerangka Aksi ASEAN untuk Sampah Laut. Workshop ini juga digunakan untuk memahami kesenjangan kebijakan di seluruh rantai nilai sampah plastik dan mengungkapkan fokus yang kuat pada isu-isu hilir daripada memasukkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular (Thailand MNRE, 2019).

Workshop kedua diselenggarakan di Singapura pada 21-22 Januari 2020. Workshop ini memungkinkan diskusi di antara negara anggota ASEAN tentang tindakan kolaboratif potensial dengan sektor swasta dan asosiasi industri. Bidang utama yang dibahas termasuk investasi, standar dan pelabelan produk, dan pengadaan ramah lingkungan. Diskusi dalam workshop ini menghasilkan aksi regional yang potensial untuk mendukung komponen keempat dari Kerangka Aksi, yaitu keterlibatan sektor swasta (ASEAN, 2021, hal. 19–20).

Workshop ketiga diselenggarakan secara virtual pada 26 Maret 2020 akibat pandemic Covid-19 yang menyebabkan semua negara memberlakukan pembatasan sosial untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Workshop ini dihadiri oleh mitra pembangunan utama, pakar sektor swasta dan pejabat pemerintah untuk mendiskusikan tentang inovasi, metodologi metrik, pengembangan kapasitas, perubahan perilaku, dan kesadaran publik. Workshop ini juga mendiskusikan tindakan regional yang potensial terkait dengan komponen kedua dan ketiga dari Kerangka Aksi (ASEAN, 2021, hal. 19–20).

6. Tahap Implementasi

Pada tahun 2021, diplomasi lingkungan untuk penanganan sampah plastik di ASEAN telah sampai pada tahap ratifikasi atau implementasi. Pada Mei 2021, ASEAN meluncurkan Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Memerangi Sampah Laut di Negara-negara Anggota ASEAN, yang menyediakan strategi bersama yang skalabel dan berfokus pada solusi untuk mengatasi sampah plastik laut di seluruh kawasan. Rencana Aksi Regional ini diadopsi menjelang Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni dan Hari Laut Sedunia pada tanggal 8 Juni, Rencana Aksi tersebut merupakan tonggak sejarah bagi ASEAN, menandakan komitmen kolektif yang diperbarui dan lebih berani melalui tindakan regional, selaras dengan agenda nasional untuk mengatasi tantangan lingkungan yang kritis (World Bank, 2021).

Rencana Aksi Regional ini mengusulkan pendekatan terpadu untuk mengatasi polusi plastik laut di ASEAN selama lima tahun ke depan (2021-2025) melalui 14 tindakan regional pada tiga tahap utama rantai nilai: 1) Mengurangi Masukan ke dalam Sistem, 2) Meningkatkan Pengumpulan dan Meminimalkan Kebocoran, dan, 3) Menciptakan Nilai untuk Penggunaan Kembali Sampah. Terdapat empat pilar dalam aksi regional ASEAN ini, yaitu dukungan dan perencanaan kebijakan; penelitian, inovasi dan peningkatan kapasitas; kesadaran publik, pendidikan dan penjangkauan; dan keterlibatan sektor swasta (ASEAN, 2021).

KESIMPULAN

Sampah plastik laut merupakan masalah lingkungan lintas batas negara. Sebagian besar sampah plastik laut bersumber dari negara-negara Asia Tenggara. Indonesia melihat isu ini membutuhkan komitmen bersama secara internasional untuk penanganannya. Karenanya, dalam penanganan sampah plastik

laut merupakan salah satu upaya Indonesia adalah melakukan diplomasi lingkungan.

Diplomasi lingkungan Indonesia dilakukan di tingkat global dan juga regional. Pada tingkat global, diplomasi lingkungan Indonesia dilakukan melalui pertemuan dan konferensi internasional terkait sampah plastik laut. Pada tingkat regional, diplomasi lingkungan Indonesia dilakukan melalui organisasi regional ASEAN.

Tujuan dari diplomasi lingkungan Indonesia melalui ASEAN adalah untuk mendorong komitmen bersama negara anggota ASEAN dalam penanggulangan sampah plastik laut. Karenanya Indonesia memiliki peran dalam setiap tahap diplomasi lingkungan di ASEAN, mulai dari tahap inisiasi, definisi masalah, pernyataan posisi awal, penyusunan kerangka aksi, perundingan akhir, hingga tahap implementasi dengan diluncurkannya Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Memerangi Sampah Laut di Negara Anggota ASEAN 2021 – 2025.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, S. H., & Vladich, H. V. (2016). Environmental Diplomacy. In C. M. Constantinou, P. Kerr, & P. Sharp (Ed.), *The SAGE Handbook of Diplomacy* (hal. 606–619). London: SAGE Publication.
- ASEAN. (2017). *Conference Summary: ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in ASEAN Region*. Diambil dari <https://environment.asean.org/wp-content/uploads/2017/12/Summary-of-ASEAN-Conference-on-Marine-Debris-26-Dec-2017.pdf>
- ASEAN. (2018, November 15). East Asia Summit Leaders' Statement on Combating Marine Plastic Debris. *Association of Southeast Asian Nations*. Diambil dari <https://asean.org/east-asia-summit-leaders-statement-on-combating-marine-plastic-debris/>
- ASEAN. (2021). ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021 – 2025). In *Asean.Org*. Diambil dari https://asean.org/?static_post=asean-regional-action-plan-combating-marine-debris-asean-member-states-2021-2025-3
- Chasek, P. S. (2001). *Earth Negotiations: Analyzing Thirty Years of Environmental Diplomacy*. Tokyo: United Nations University Press.
- Greeners.co. (2017, Februari 24). At World Ocean Summit 2017, Indonesia Pays Attention to Oceans. *Greeners.co*. Diambil dari <https://www.greeners.co/english/at-world-ocean-summit-2017-indonesia-pays-attention-to-oceans/>
- Hermawan, C., & Sidik, H. (2019). Momentum Diplomasi Maritim Indonesia: Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik di Laut 2019-2024. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 1(1), 23. <https://doi.org/10.24198/padjir.v1i1.21590>
- Infopublik. (2017, September 7). Indonesia dan Selandia Baru Selenggarakan Konferensi East Asia Summit. *Info Publik*. Diambil dari <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/220915/indonesia-dan-selandia-baru-selenggarakan-konferensi-east-asia-summit>
- IUCN. (2021). Marine plastic pollution. Diambil dari International Union for Conservation of Nature website: <https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastic-pollution#:~:text=Impacts on marine ecosystems,stomachs become filled with plastic.>
- Kemenko Marves. (2018a). *Executive Summary: Indonesia's Plan of Action on Marine Plastic Debris 2018-2025*. Jakarta.
- Kemenko Marves. (2018b, Oktober 30). Sampah Plastik Laut Adalah Isu Lintas Batas. *Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi*. Diambil dari <https://maritim.go.id/sampah-plastik-laut-adalah-isu-lintas-batas/>
- Kemenko Marves. (2020, Mei 27). Penanganan Sampah Laut Masih Terus Berlanjut. *Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi*. Diambil dari <https://maritim.go.id/penanganan-sampah-laut-masih-terus-berlanjut/>
- Kemlu. (2019, April 10). Penanganan sampah plastik laut (Marine plastic debris). *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. Diambil dari

- https://kemlu.go.id/portal/id/read/172/halaman_list_lainnya/penanganan-sampah-plastik-laut-marine-plastic-debris
- KKP. (2018, Oktober 31). Our Ocean Conference 2018, Wujudkan Kepemimpinan Indonesia di Sektor Kelautan Dan Perikanan. *Kementerian Komunikasi dan Informatika*. Diambil dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/15223/our-ocean-conference-2018-wujudkan-kepemimpinan-indonesia-di-sektor-kelautan-dan-perikanan/0/artikel_gpr
- Kristi Firmalasari, B., & Rasyidah, R. (2020). The Impact of the Covid-19 Pandemic on the Environment: Environmental Diplomacy on Handling Covid-19 Medical Waste in Indonesia. *Journal of Taylor and Francis Group*, 01(02), 12.
- Kurniaty, T. (2020). Indonesia Environmental Diplomacy in President Joko Widodo's Era (2014-2019) of The Issue Rejection Indonesia's CPO by European Union. *Sociae Polites*, 21(1), 62–72. <https://doi.org/10.33541/sp.v21i1.1585>
- Manalu, J. E. R. (2018, November 1). Our Ocean Conference 2018 Usai, Indonesia Jalin Sejumlah Kesepakatan Bilateral. *Bisnis.com*. Diambil dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20181101/99/855797/our-ocean-conference-2018-usai-indonesia-jalin-sejumlah-kesepakatan-bilateral>
- Meijer, L. J. J., van Emmerik, T., van der Ent, R., Schmidt, C., & Lebreton, L. (2021). More than 1000 rivers account for 80% of global riverine plastic emissions into the ocean. *Science Advances*, 7(18). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz5803>
- Ningsih, P. C. H. (2019). Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia-Norwegia Melalui REDD+ Agreement. *Insignia: Journal of International Relations*, 6(2), 83. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2019.6.2.1504>
- Norway in Indonesia. (2018). Norway increasing funding for global efforts to combat marine litter. Diambil dari Royal Norwegian Embassy in Jakarta website: <https://www.norway.no/en/indonesia/norway-indonesia/news-events/news2/norway-increasing-funding-for-global-efforts-to-combat-marine-litter/>
- Our Ocean. (2018). Our Ocean Conference: Our Ocean, Our Legacy. Diambil dari ourocean.org website: <https://ourocean2018.org>
- Robertua, V., & Sigalingging, L. (2019). Indonesia Environmental Diplomacy Reformed: Case Studies of Greening Asean Way and Peat Restoration Agency. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.1-15.2019>
- Supam, A., Robyn, B., & Haniy, S. U. (2019, September 4). 3 Ways for Indonesia to Reduce Plastic Pollution in the Ocean. *WRI Indonesia*. Diambil dari <https://wri-indonesia.org/en/blog/3-ways-indonesia-reduce-plastic-pollution-ocean>
- Susskind, L. E., & Ali, S. H. (2015). *Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global Agreements*. Oxford: Oxford University Press.
- Thailand MNRE. (2019). The Ministry of Natural Resources and Environment made the closing remark at the Joint Inception Workshop on Supporting Marine Debris Reduction in ASEAN Member States: Drafting a Regional Action Plan, and Designing National Action Plans on Marine Debris. Diambil dari Thailand Ministry of Natural Resources and Environment website: <http://www.mnre.go.th/en/news/detail/48208>
- TKN PSL. (2018). Struktur Organisasi. Diambil dari Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut website: <https://sampahlaut.id/struktur-organisasi-2/>
- TKN PSL. (2020). *Sampah Laut Update: Buletin Bulanan Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut*. Jakarta.
- Udovič, B., & Pongrac, M. (2016). The development, (Non) institutionalisation, and (Lost) opportunities of slovenian environmental diplomacy in the last 25 years. *Croatian International Relations Review*, 22(76), 29–51. <https://doi.org/10.1515/cirr-2016-0005>
- UNEA. (2014). UNEA 1. Diambil dari United Nations Environment Assembly website: <https://unea.marinelitter.no/unea->

- resolutions-on-marine-litter/unea1-2/
UNEP. (2014). Environmental Diplomacy and Mediation. Diambil dari United Nations Environment Programme website: <http://www.unep.org/disastersandconflicts/Introduction/ECP/%0AEnvironmentalDiplomacy/tabid/105991/Default.aspx>
- VOI.id. (2021, Februari 19). Coordinating Minister Luhut: Indonesia-Japan Cooperation To Handle Environmental Issues. VOI. Diambil dari <https://voi.id/en/news/34151/coordinating-minister-luhut-indonesia-japan-cooperation-to-handle-environmental-issues>
- World Bank. (2018). Hotspot Sampah Laut Indonesia. In *World Bank Group*. Diambil dari <http://documents.worldbank.org/curated/en/642751527664372193/pdf/126686-INDONESIA-29-5-2018-14-34-5-SynthesisFullReportAPRILIND.pdf>
- World Bank. (2021, Maret 28). ASEAN Member States Adopt Regional Action Plan to Tackle Plastic Pollution. *World Bank Group*. Diambil dari <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/05/28/asean-member-states-adopt-regional-action-plan-to-tackle-plastic-pollution>

BIOGRAFI

Hendar lulusan Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pasundan (2017) dan Magister Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran 2022 yang tertarik meneliti mengenai diplomasi khususnya diplomasi lingkungan.

Teuku Rezasyah adalah dosen pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran yang banyak mengkaji tentang diplomasi.

Deasy Silvy Sari merupakan pengajar pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran yang mengkaji mengenai Kebijakan Luar Negeri, Diplomasi, dan Regionalisme.